

RELASI HISTORIS DAN SOSIOKULTURAL ANTARA SUNDA, PRIANGAN, DAN JAWA BARAT: SEBUAH TINJAUAN KRITIS

Mumuh Muhsin Zakaria

Dosen Departemen Sejarah dan Filologi, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Padjadjaran, Sumedang.

E-mail: mumuh.muhsin@unpad.ac.id

ABSTRAK. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis relasi antara tiga entitas: Sunda, Priangan, dan Jawa Barat. Banyak kalangan menyamakan ketiganya, padahal masing-masing memiliki konteks, batasan, dan makna yang berbeda. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan historis-sosiologis melalui studi literatur terhadap sumber-sumber. Hasil analisis menunjukkan bahwa: (1) Sunda merujuk pada identitas etnokultural yang lebih luas, melampaui batas Provinsi Jawa Barat sekarang, yang ditandai oleh bahasa, sistem keyakinan, dan adat istiadat; (2) Priangan adalah konstruksi kolonial Belanda yang terbentuk dari Mataram dan VOC, yang membentuk identitas aristokratik, budaya “menak”, dan menjadi jantung kebudayaan Sunda modern; (3) Jawa Barat adalah produk negara-bangsa (*nation-state*) Indonesia pasca-kemerdekaan yang membekukan dan mengadministrasikan keragaman di dalamnya ke dalam satu wilayah pemerintahan. Ketiganya saling beririsan dan membentuk dialektika yang terus berlangsung, di mana Jawa Barat menjadi wadah politis, Priangan sebagai inti kultural yang dominan, dan Sunda sebagai payung identitas yang lebih inklusif namun juga terkadang tereksklusi oleh dominasi narasi Prianganisasi. Pemahaman terhadap relasi ini penting untuk kebijakan pembangunan yang inklusif dan pelestarian keragaman budaya di tingkat lokal.

Kata kunci: Sunda; Priangan; Jawa Barat; Identitas; Sejarah; Sosiokultural.

HISTORICAL AND SOCIOCULTURAL RELATIONS BETWEEN SUNDANESE, PRIANGAN, AND WEST JAVA: A CRITICAL REVIEW

ABSTRACT. This article aims to analyze the complex relations between three entities: Sunda, Priangan, and West Java. Many parties often equate the three, whereas each has different contexts, boundaries, and meanings. This research uses a qualitative method with a historical-sociological approach through a literature study. The analysis results show that: (1) Sunda refers to a broader ethnocultural identity, beyond the current borders of West Java Province, characterized by language, belief systems, and customs; (2) Priangan is a colonial Dutch construction formed from Mataram and VOC influences, which shaped an aristocratic identity, “menak” culture, and became the heart of modern Sundanese culture; (3) West Java is a product of the post-independence Indonesian nation-state that froze and administered the diversity within it into one governmental region. The three intersect and form an ongoing dialectic, where West Java is the political container, Priangan is the dominant cultural core, and Sunda is a more inclusive identity umbrella that is sometimes marginalized by the dominance of the Prianganization narrative. Understanding this relationship is crucial for inclusive development policies and the preservation of cultural diversity at the local level.

Keywords: Sunda; Priangan; West Java; Identity; History; Sociocultural.

PENDAHULUAN

Provinsi Jawa Barat, sebagai salah satu provinsi dengan populasi terbesar di Indonesia, sering diidentikkan secara simplistik dengan kebudayaan Sunda. Dalam narasi populer dan bahkan dalam beberapa diskusi akademis, istilah “Orang Sunda,” “Urang Priangan,” dan “Warga Jawa Barat” sering digunakan secara bergantian. Namun, pengidentifikasian seperti ini mengaburkan kompleksitas historis, sosiologis, dan kultural yang melekat pada masing-masing konsep. Ketiganya—Sunda, Priangan, dan Jawa Barat—adalah entitas yang terbentuk dalam konteks zaman yang berbeda, dengan logika pembentukannya masing-masing.

Sunda, pertama-tama, adalah sebuah entitas etnokultural yang akarnya dapat ditelusuri jauh ke masa pra-Islam, dengan kerajaan-

kerajaan seperti Kerajaan Taruma-nagara dan Kerajaan Sunda (Ekadjati, 2005). Identitas Sunda dibangun di atas fondasi bahasa, sistem kosmologi, dan adat istiadat yang khas. Ruang lingkungannya tidak pernah terbatas secara ketat pada wilayah adminis-tratif Jawa Barat masa kini, melainkan mencakup pula sebagian Banten, Jakarta, Cirebon, dan bahkan wilayah-wilayah yang kini masuk Jawa Tengah (seperti Brebes).

Priangan, di sisi lain, adalah sebuah wilayah inti di Tatar Sunda yang mengalami konstruksi sosial-politik yang sangat kuat pada masa kolonial. Istilah ini merujuk pada dataran tinggi di bagian tenggara Jawa Barat yang menjadi basis sistem tanam paksa (*Preanger-stelsel*) kopi (Bremen, 2014). Pembentukan Karesidenan Priangan oleh Belanda tidak hanya merupakan keputusan administratif, tetapi juga sebuah proses politik yang menciptakan kelas elit

priyayi Sunda (menak) yang bekerja sama dengan kolonial. Wilayah inilah yang kemudian paling kuat mengklaim dan merepresentasikan "Kesundaan" yang otentik, sehingga memarginalkan varian-varian kebudayaan Sunda lain di wilayah utara (Cirebon) dan barat (Banten) (Ekadjati, 1981).

Jawa Barat adalah entitas yang paling muda. Ia lahir dari proses politik pasca-kemerdekaan Indonesia. Sebagai sebuah provinsi, ia adalah alat negara untuk mengatur, mengadministrasi, dan memerintah. Batas-batasnya adalah produk kompromi politik, bukan murni kesatuan kultural. Dalam wadah inilah, keragaman sub-etnis dan budaya Sunda (termasuk Priangan, Sunda Banten, dan Sunda Cirebon) "dibekukan" menjadi satu label administratif.

Permasalahan yang muncul adalah dominannya narasi kebudayaan Priangan dalam mewakili seluruh identitas Jawa Barat, yang sering disebut sebagai "Prianganisasi". Hal ini berimplikasi pada kebijakan budaya, pendidikan, dan bahkan pembangunan ekonomi yang tidak selalu merata. Oleh karena itu, artikel ini bermaksud untuk menguraikan secara kritis relasi historis dan sosiokultural antara Sunda, Priangan, dan Jawa Barat dengan pertanyaan penelitian: Bagaimana ketiga entitas ini terbentuk dan berinteraksi, serta apa implikasi dari dialektika tersebut terhadap konstruksi identitas dan kebijakan di Jawa Barat kontemporer?

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan historis-sosiologis. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) terhadap sejumlah sumber terutama sumber sekunder. Sumber tersebut meliputi buku, jurnal ilmiah, artikel, dan publikasi akademis lain yang relevan dengan topik pembahasan.

Data yang terkumpul dianalisis secara kritis dengan teknik analisis isi (*content analysis*) dan analisis historis. Analisis dilakukan dengan merekonstruksi sejarah terbentuknya masing-masing entitas, mengidentifikasi titik-temu dan ketegangan di antara mereka, serta menginterpretasikan makna sosiokultural dari relasi tersebut dalam konteks kekinian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Sunda: Etnisitas, Bahasa, dan Ruang Kultur yang Melampaui Batas.

Identitas Sunda pada dasarnya adalah sebuah konstruksi yang berdiri di atas tiga pilar

utama: bahasa, agama/kepercayaan, dan sejarah bersama. Bahasa Sunda, dengan berbagai tingkatannya (*alus, sedeng, loma, kasar*), merupakan penanda identitas yang paling nyata (Anderson, 2006). Namun, perlu dicatat bahwa bahasa Sunda sendiri memiliki dialek-dialek yang beragam, seperti dialek Banten, Bogor, Priangan, dan Cirebon, yang mencerminkan variasi internal dalam kebudayaan Sunda (Fadholi & Supriatin, 2016; Akhmad, 2024).

Dalam perspektif sejarah, kerajaan Sunda pra-Islam, terutama Pajajaran yang beribu kota di Pakuan (sekarang Bogor), menjadi mitos asal-usul (*origin myth*) yang *powerful* bagi orang Sunda (Ekadjati, 2005). Kejatuhan Pajajaran oleh kesultanan Banten dan Cirebon yang telah memeluk Islam menandai babak baru, di mana identitas Sunda mulai berasimilasi dengan Islam, menciptakan sintesis yang khas, berbeda dengan Jawa yang lebih kuat dipengaruhi oleh tradisi Hindu-Budha di tingkat istana (Danasasmita, 2003).

Ruang kultural Sunda, atau yang dikenal sebagai Tatar Sunda/Pasundan, secara tradisional lebih luas dari Jawa Barat sekarang. Edi S. Ekadjati (2005) memetakan wilayah ini mencakup seluruh Provinsi Jawa Barat, Banten, Jakarta, dan bagian barat Jawa Tengah. Cirebon, meski memiliki percampuran budaya Sunda-Jawa yang kuat, tetap dianggap sebagai bagian dari dunia Sunda, meski sering berada di pinggiran (*periphery*). Dengan demikian, Sunda adalah entitas yang cair dan tidak terikat oleh batas administratif modern (Ekadjati, 2005).

2. Priangan: Konstruksi Kolonial dan Kelas Menak.

"Parahyangan" berasal dari kata "*hyang*" atau "*rahyang*", yang kemudian mendapat awalan "para-" dan akhiran "-an", atau awalan "pa-" dan akhiran "-an." Ini adalah asal dari kata "priangan". Kata ini dapat diartikan sebagai "daerah tempat tinggal tuhan atau dewa (*hyang*) yang harus dihormati" atau "daerah tempat tinggal leluhur yang harus dihormati". Selain itu, ada juga yang berpendapat bahwa kata "priangan" berasal dari kata "*prayangan*", yang berarti "menyerah dengan hati yang tulus". Pengertian kedua ini berkaitan dengan peristiwa sejarah, seperti penyerahan wilayah Tatar Sunda oleh Pangeran Suriadiwangsa (Raja Sumedanglarang) kepada Sultan Agung Mataram pada tahun 1620 (Zakaria, 2009).

Pendapat yang kedua mengesankan bahwa kata "priangan" baru muncul pada tahun 1620, padahal kata itu sudah ada dan menjadi judul sebuah naskah, "Carita Parahyangan", yang

ditulis sekitar akhir abad ke-16, masa akhir Kerajaan Sunda (Darsa, 2004).

Priangan, sebagai wilayah inti, memiliki sejarah yang berbeda dan sangat menentukan wajah Jawa Barat sekarang. Awalnya, wilayah ini berada di bawah pengaruh Kesultanan Mataram. Setelah Perjanjian Gianti (1755), VOC semakin leluasa menguasai wilayah ini. Pembentukan Karesidenan Priangan pada awal abad ke-19 merupakan langkah politis Belanda untuk mengontrol produksi kopi, komoditas yang sangat menguntungkan (Bremen, 2014).

Sistem tanam paksa kopi di Priangan melahirkan sebuah struktur sosial yang unik. Para bupati dan keluarga priyayi Sunda (yang disebut *menak*) diangkat dan diberi kekuasaan oleh Belanda untuk menggerakkan sistem ini. Mereka menjadi perantara (*intermediaries*) antara pemerintah kolonial dan rakyat. Kelas *menak* inilah yang kemudian membentuk budaya aristokrat Priangan, dengan nilai-nilai kesopanan, seni (tembang Cianjuran, jaipongan), dan tata krama yang sangat halus (Wessing, 1986). Kota-kota seperti Bandung, Cianjur, Sumedang, Garut, dan Tasikmalaya menjadi pusat dari budaya "Sunda Priangan" ini (Lubis, 1998).

Dalam perkembangannya, melalui sistem pendidikan dan birokrasi kolonial, budaya *menak* Priangan ini dihegemoni dan dianggap sebagai representasi paling otentik dan "tinggi" dari kebudayaan Sunda. Bahasa Sunda *lemes* (halus) yang digunakan di kalangan *menak* Priangan menjadi standar bahasa yang diajarkan di sekolah-sekolah, sementara dialek-dialek lain dianggap "kasar" (Gunardi *et al.*, 1996). Inilah awal dari proses "Prianganisasi" di mana budaya dari satu sub-wilayah menjadi dominan atas sub-wilayah lainnya.

3. Jawa Barat: Wadah Administratif dalam Negara-Bangsa Indonesia.

Provinsi Jawa Barat berdiri pada 1 Januari 1926. *Staatsblad* (Lembaran Negara) Tahun 1925 Nomor 378 tanggal 14 Agustus mengatur pembentukannya. Saat itu, orang Sunda menyebutnya Provinsi Pasundan. Jawa Barat adalah provinsi pertama yang dibentuk. Setelah itu, pada tahun 1928, *Provincie Oost Java* (Provinsi Jawa Timur) dibentuk, dan pada tahun 1929, *Provincie Midden Java* (Provinsi Jawa Tengah). Pada awalnya, Provinsi Jawa Barat terdiri dari lima keresidenan dan enam kotapraja (*stadsgemeente*). Banten, Batavia (Jakarta), Buitenzorg (Bogor), Priangan, dan Cirebon adalah lima keresidenan, dan keenam kotapraja adalah Batavia, Meester Cornelis, Buitenzorg,

Bandung, Cirebon, dan Sukabumi (Ekadjati, 1995; Zakaria, 2009).

Provinsi ini menjadi alat negara untuk menjalankan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik. Batas-batasnya adalah hasil dari pertimbangan geopolitik, yang memisahkan Banten (yang kemudian menjadi provinsi sendiri pada tahun 2000) dan mempertahankan Cirebon dalam wilayah Jawa Barat.

Sebagai sebuah wadah administratif, Jawa Barat adalah entitas yang heterogen. Di dalamnya terdapat bukan hanya orang Sunda dari berbagai sub-budaya (Priangan, Banten, Cirebon, dsb.), tetapi juga komunitas Jawa (di perbatasan dengan Jawa Tengah), Betawi, serta pendatang dari berbagai suku bangsa Indonesia. Negara, melalui kebijakannya, cenderung menyederhanakan keragaman ini. Misalnya, muatan lokal di sekolah-sekolah Jawa Barat sering kali hanya mengajarkan bahasa dan budaya Sunda standar (yang bernuansa Priangan), mengabaikan kekhasan lokal daerah lain seperti Banten dan Cirebon (Kusmanto *et al.*, 2024).

Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dalam upaya melestarikan budaya, sering kali mempromosikan simbol-simbol yang berasal dari jantung Priangan. Tembang Cianjuran, Jaipongan, dan Upacara Seren Taun dari komunitas adat Cigugur Kuningan misalnya, lebih sering ditampilkan mewakili "Budaya Jawa Barat" daripada seni Debus dari Banten atau Tari Topeng dari Cirebon. Hal ini semakin mengukuhkan hegemoni budaya Priangan di dalam ruang politik Jawa Barat.

4. Dialektika Sunda, Priangan, dan Jawa Barat: Konvergensi dan Ketegangan.

Relasi antara ketiga entitas ini adalah dialektis, penuh dengan konvergensi dan ketegangan. Konvergensi; dalam praktiknya, Jawa Barat menjadi panggung di mana identitas Sunda, dengan varian Priangannya yang dominan, dipertunjukkan dan direproduksi. Bagi banyak orang luar, Jawa Barat adalah Sunda, dan Sunda adalah Priangan. Peta budaya Indonesia pun sering menyederhanakan demikian. Ibu kota Provinsi Jawa Barat, Bandung, yang *notabene* adalah jantung Priangan, menjadi pusat gravitasi politik, ekonomi, dan budaya, sehingga semakin memperkuat persepsi ini (Garna, 2008).

Ketegangan; ketegangan muncul dari proses marginalisasi. Masyarakat Sunda Banten, misalnya, dengan karakter budaya yang lebih egaliter dan religius (dipengaruhi Islam yang lebih ortodoks), sering merasa bahwa identitas mereka tidak sepenuhnya terwakili dalam narasi

besar "Jawa Barat" yang bernuansa Priangan (Maunati, 2015). Demikian pula dengan masyarakat Cirebon yang memiliki tradisi "keprabon" (keraton) dan seni yang merupakan sintesis Sunda-Jawa, sering kali merasa berada di "persimpangan" dan tidak sepenuhnya diterima baik dalam dunia Sunda maupun Jawa (Wiyata, 2015).

Ketegangan lain muncul dari globalisasi dan urbanisasi. Kota-kota besar di Jawa Barat seperti Bekasi, Depok, dan Bogor telah menjadi sangat kosmopolitan. Di sana, identitas Sunda tidak lagi menjadi identitas dominan, melainkan satu dari banyak identitas. Hal ini menciptakan tantangan baru bagi pelestarian bahasa dan budaya Sunda, bahkan dalam varian Priangan sekalipun.

5. Implikasi terhadap Kebijakan dan Masa Depan.

Pemahaman yang kritis tentang relasi ini sangat penting bagi perumusan kebijakan yang adil dan inklusif. Kebijakan Budaya; pemerintah Provinsi Jawa Barat perlu mengadopsi pendekatan multikultural dalam kebijakan budayanya (Kleden, 2004). Alih-alih hanya mempromosikan budaya Priangan, harus ada pengakuan dan ruang yang sama bagi kekhasan budaya Sunda Banten, Sunda Cirebon, dan lainnya. Muatan lokal di sekolah harus fleksibel dan mengakomodasi keragaman dialek dan tradisi setempat.

Pembangunan Wilayah; pemahaman bahwa Jawa Barat bukan hanya Priangan dapat mendorong pembangunan yang lebih merata. Fokus pembangunan tidak boleh hanya terpusat di Bandung Raya dan sekitarnya, tetapi juga harus memperkuat pusat-pusat pertumbuhan lain seperti Banten dan Cirebon, dengan mempertimbangkan potensi dan karakteristik khasnya.

Riset dan Akademisi; dunia akademik perlu lebih banyak menghasilkan penelitian yang mengungkap dinamika dan keragaman internal dalam masyarakat Sunda dan Jawa Barat. Hal ini akan memberikan landasan teoretis yang kuat bagi upaya dekonstruksi narasi dominan dan rekonstruksi narasi yang lebih inklusif.

SIMPULAN

Sunda, Priangan, dan Jawa Barat adalah tiga entitas yang saling berhubungan namun tidak identik. Sunda adalah payung etnokultural yang luas dan cair. Priangan adalah jantung kebudayaan Sunda yang terbentuk melalui proses kolonial dan memiliki pengaruh yang sangat

dominan. Sementara Jawa Barat adalah wadah administratif negara-bangsa Indonesia yang membekukan keragaman di dalamnya.

Relasi ketiganya ditandai oleh dialektika yang terus berlangsung. Di satu sisi, terjadi konvergensi di mana Jawa Barat menjadi representasi politik dari Sunda, dengan Priangan sebagai inti kulturalnya. Di sisi lain, terdapat ketegangan yang disebabkan oleh dominasi budaya Priangan (Prianganisasi) yang meminggirkan varian-varian kebudayaan Sunda lainnya di wilayah Banten, Cirebon, dan daerah pinggiran lain.

Agar pembangunan dan pelestarian budaya di Jawa Barat dapat berjalan secara adil dan berkelanjutan, diperlukan kesadaran kritis akan kompleksitas relasi ini. Pengakuan terhadap keragaman internal dan penghindaran dari penyamarataan adalah kunci untuk membangun Jawa Barat yang inklusif, di mana semua anak bangsanya, baik yang Sunda Priangan, Sunda Banten, Sunda Cirebon, maupun non-Sunda, merasa memiliki ruang dan diakui kontribusinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Akhmad, I. dan I. S. H. (2024). Analisis Perbandingan Dialek Bahasa Sunda di Jawa Barat (Kajian Linguistik Sinkronis). *Prosiding Seminar Hasil Penelitian dan PKMISBI Bandung*, 196–204.
- Anderson, B. R. O. (2006). *Language and Power: Exploring Political Cultures in Indonesia*. Cornell University Press.
- Breman, J. (2014). *Keuntungan Kolonial dari Kerja Paksa; Sistem Priangan dari Tanam Paksa Kopi di Jawa, 1720-1870*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Danasasmita, S. (2003). *Nyukcruk Sajarah Pakuan Pajajaran jeung Prabu Siliwangi*. Girimukti.
- Darsa, U. A. (2004). "Kropak 406; Carita Parahyangan dan Fragmen Carita Parahyangan", Makalah disampaikan dalam Kegiatan Bedah Naskah Kuna yang diselenggarakan oleh Balai Pengelolaan Museum Negeri Sri Baduga.
- Ekadjati, E.S. (1981). *Historiografi Priangan*.
- Ekadjati, E.S. (1995). *Sunda, Nusantara, dan Indonesia; Suatu Tinjauan Sejarah*. Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar dalam Ilmu Sejarah Fakultas Sastra Universitas Padjadjaran pada Hari Sabtu, 16

Desember `1995.

- Ekadjati, E.S. (2005). *Kebudayaan Sunda; suatu Pendekatan Sejarah* (Vol. 1). Pustaka Jaya.
- Elson, R.E. (1994). *Village Java under the Cultivation System, 1830–1870*. Allen and Unwin.
- Fadholi, A., & Supriatin, D. (2016). Sistem Pola Tanam di Wilayah Priangan Berdasarkan Klasifikasi Iklim Oldeman. *Jurnal Geografi Gea*, 12(2). <https://doi.org/10.17509/gea.v12i2.1788>
- Garna, J.K. (2008). *Budaya Sunda: melintasi waktu menantang masa depan*. Lembaga Penelitian Unpad dan Judistira Garna Foundation.
- Gunardi, G., Abdulwahid, I., Umsari, O.S., & Wahya. (1996). *Undak-Usuk dan Dampaknya dalam Perilaku Berbahasa Sunda*. Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.
- Kleden, I. (2004). *Kebudayaan dan Pembangunan*. LP3ES.
- Kusmanto, K., Setyobudi, I., & Yuningsih, Y. (2024). Pelajaran Bahasa Sunda di Kabupaten Cirebon. *Jurnal Budaya Etnika*, 8(2), 1–14.
- Lubis, N.H. (1998). *Kehidupan Kaum Ménak Priangan 1800-1942*. Pusat Informasi Kebudayaan Sunda.
- Maunati, Y. (ed. . (2015). *Banten: Masa Lalu dan Kini*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Wessing, R. (1986). *The Soul of Ambiguity: The Tiger in Southeast Asia*. Center for Southeast Asian Studies Northern Illinois University.
- Wiyata, A.L. (2015). *Carita Wong Cirebon: Membedah Identitas Etnik & Budaya*. Pustaka Pelajar.
- Zakaria, M.M. (2009). *Sunda, Priangan, dan Jawa Barat*.